KOTA MADIUN

MADIUN
MAJU MENDUNIA

LKJ

(LAPORAN KINERJA)

2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MADIUN

(0351) 471151 https://dpupr.madiunkota.go.id dinaspupr.kotamadiun

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta semua unsur mulai dari pimpinan, pejabat administrator, pejabat pengawas, sub koordinator dan unsur pelaksana yang telah bekerja sama untuk melaksananan pembuatan laporan ini. Tujuan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penanganan yang baik (*good governance* yang amanah) dan bersih (*clear governance*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran, pelaksanaan program kerja dan Penggunaan Anggaran tahun 2025 dalam mencapai tujuan.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 merupakan rangkaian proses Akuntabilitas Penjabaran Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025-2026 kedalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2025. Selain itu penyusunan LKjIP untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 13 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Dwi Setyo Nugroho, S.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 197706102005011005

DAFTAR ISI

Halaman Judul		.....	i
Kata Pengantar		.....	ii
Daftar Isi		.....	Iv
Daftar Tabel		.....	Vi
Daftar Gambar		.....	Vii
Ringkasan Eksekutif		.....	Viii
BAB I	:	PENDAHULUAN.....	1
		A. LATAR BELAKANG.....	1
		B. LANDASAN HUKUM.....	2
		C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	4
		D. GAMBARAN UMUM.....	5
		E. SUMBER DAYA.....	10
		F ISU STRATEGIS.....	13
		G. PERMASALAHAN UTAMA	17
		H. ISU GENDER	20
BAB II	:	PERENCANAAN KINERJA.....	25
		A. RENCANA STRATEGIS.....	25
		1. Tujuan Dinas	26
		2. Sasaran.....	27
		3. Strategi dan Kebijakan.....	29
		B. PERJANJIAN KINERJA.....	31
		1. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	31
		2. Program dan Kegiatan.....	32
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	45
		1.1 AKUNTABILITAS KINERJA	45
		1.1.1 Metode Pengukuran	47
		1.1.2 Realisasi Kinerja Tahun 2025	48
		1.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN	69
		1.2.1 Realisasi Anggaran.....	69
		1.2.2 Efisiensi Anggaran.....	75

		1.3 PEMANFAATAN DATA KINERJA SEBAGAI ACUAN PERENCANAAN	79
		1.3.1 Analisis Data Kinerja sebagai acuan perencanaan Tahun berikutnya.....	79
		1.3.2 Inovasi.....	83
BAB IV	:	PENUTUP.....	86
		A. Kesimpulan.....	86
		B. Permasalahan.....	86
		C. Upaya Meningkatkan Kinerja.....	87
LAMPIRAN		.....	89
		Lampiran 1 Pohon Kinerja Tahun 2025.....	90
		Lampiran 2 Matriks Renstra Tahun 2025 - 2026.....	91
		Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	110
		Lampiran 4 Capaian Triwulan IV Tahun 2025.....	113
		Lampiran 5 Penghargaan DPUPR Tahun 2025.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pegawai Berdasarkan Gol./Ruang Kepangkatan (PNS dan CPNS) 10
Tabel 2. Pegawai Berdasarkan Gol./Ruang Kepangkatan (PPPK Fulltime) 10
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/Bidang (PNS dan CPNS) 10
Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/Bidang (PPPK Fulltime) 11
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun 12
Tabel 6. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah 17
Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender DPUPR Tahun 2025 21
Tabel 8. Gender Analysis Pathway DPUPR Tahun 2025 23
Tabel 9. Sasaran Jangka Menengah 28
Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 29
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 31
Tabel 12. Sasaran, Indikator Sasaran, dan Pagu Anggaran Tahun 2025 32
Tabel 13. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator, Target dan Anggaran Tahun 2025 34
Tabel 14. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran 48
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Target Tahun 2025 49
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan 4 Tahun Terakhir 49
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Target Akhir Renstra 50
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Provinsi/Nasional 50
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan Target Tahun 2025 52
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan 4 Tahun Terakhir ... 52
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2026 53
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan Provinsi/ Nasional 53
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan Target Tahun 2025 55
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan 4 Tahun Terakhir ... 56
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025 - 2026 56
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan Provinsi/Nasional ... 56
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan Target Tahun 2025 58
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan 4 Tahun Terakhir ... 58
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025 - 2026 59
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan Provinsi/Nasional ... 59
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan Target Tahun 2025 61
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan 4 Tahun Terakhir ... 61

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025 - 2026 64
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan Provinsi/ Nasional .. 64
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan Target Tahun 2025 66
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan 4 Tahun Terakhir ... 66
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan Target Akhir Renstra 67
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan Provinsi/Nasional ... 67
Tabel 39. Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Sasaran 69
Tabel 40. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 70
Tabel 41. Perhitungan E_{RO} Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun 77
Tabel 42. Data Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2025..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas 50
Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab 53
Gambar 3. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan - Indikator Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik..... 62
Gambar 4. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan - Indikator Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan 63
Gambar 5. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan - Indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Jaringan Air Minum 63
Gambar 6. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik 67

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi perangkat daerah di Tahun 2025. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tahun 2025, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran. Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran diukur capaiannya dan dianalisis dalam LKj ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjin Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi kinerja tujuan dan sasaran telah tercapai.

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 sebesar Rp. 128.136.735.798,39 sedangkan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah Rp. 121.495.324.403,00 atau sebesar 94,82%. Nilai efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian kinerja, alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada angka 5,97% dengan kategori "Efisien".

Dari seluruh target kinerja yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah tercapai secara keseluruhan. Adapun kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tujuan	:	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas**
Indikator	:	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Target: 92,49%	Realiasi: 95.17%	Capaian: 102,90%

Sasaran 1	:	**Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantab**
Indikator	:	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab
Target: 95,80%	Realiasi: 96,05%	Capaian: 100,3%

Sasaran 2	**:**	**Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan**	
Indikator	:	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	
Target: 100%		Realiasi: 100%	Capaian: 100%

Sasaran 3	**:**	**Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah**	
Indikator	:	Persentase bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan	
Target: 100%		Realiasi: 100%	Capaian: 100%

Sasaran 4	**:**	**Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan**	
Indikator 1	:	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	
Target: 81,67%		Realiasi: 81,77%	Capaian: 100,2%
Indikator 2	:	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	
Target: 16,97%		Realiasi: 16,68%	Capaian: 101,7%
Indikator 3	:	Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	
Target: 100%		Realiasi: 100%	Capaian: 100%
Indikator 4	:	Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	
Target: 100%		Realiasi: 100%	Capaian: 100%

Sasaran 5	**:**	**Meningkatnya kualitas layanan publik**	
Indikator	:	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	
Target: 4.20 Indeks		Realiasi: 4.38 Indeks	Capaian: 104%

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja (LKj), berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
2. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Laporan Kinerja (LKj) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta pembandingan capaian indicator kinerja.

Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah salah satu dari Instansi-instansi yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, dan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam tahun anggaran 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Negara;
7. Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun;
15. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 060-401.021/335/2021 tentang Tugas Subkoordiator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dari penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Sedangkan tujuan dari pelaporan kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dengan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah diberikan dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun menyelenggarakan fungsi antara lain:

a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan Penataan Ruang;
d) Pelaksanaa pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 73 TAHUN 2021

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 73 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

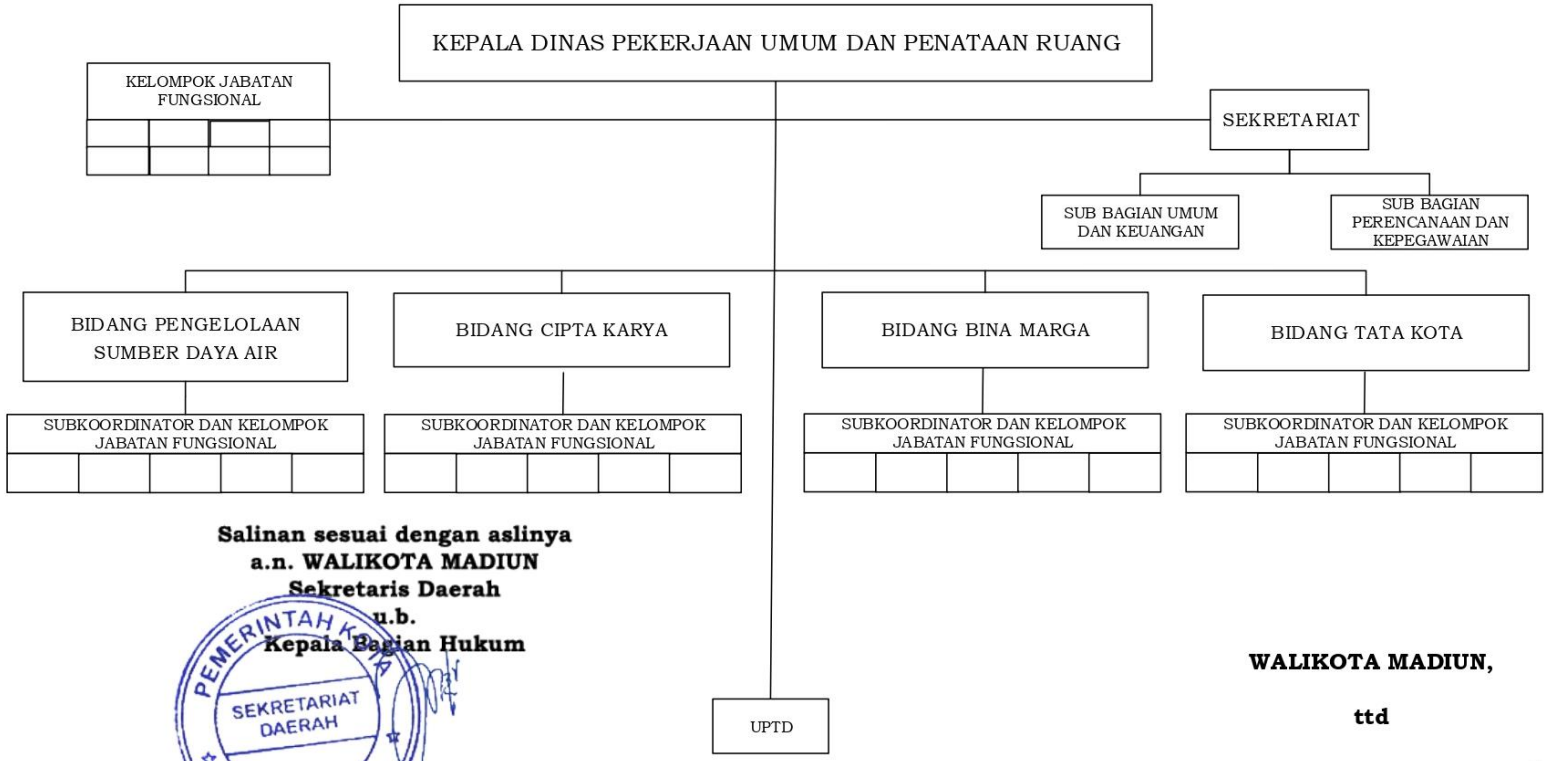

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Tugas dan fungsi masing-masing bagian diuraikan secara rinci pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, RincianTugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Secara ringkas tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan gedung dan bangunan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

   Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Sub Bagian Umum dan Keuangan. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing-masing bertanggungjawab kepada Sekretaris.

   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
      1) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
      2) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
      3) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya di lingkungan Dinas;

4) menyusun, mengolah, dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
5) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
1) melakukan penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
3) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
4) melakukn urusan kehumasan, protokoler, upacara, dan rapat dinas;
5) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian, dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
7) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
8) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
9) menyusun rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas;
10) melaksanakan rencana program pelaksanaan pengadaan/ pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
11) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas yang meliputi menyelengarakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan pengendalian

banjir. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu:

a. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Air
b. Sub Koordinator Pengendalian Banjir

4. Bidang Cipta Karya

   Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi, penataan bangunan gedung, dan penataan bangunan dan lingkungan. Bidang Cipta Karya terdiri dari 3 (tiga) Sub Koordinator, yaitu:

   a. Sub Koordinator Pengembanan Jasa Konstruksi
   b. Sub Koordinator Penataan Bangunan Gedung
   c. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan

5. Bidang Bina Marga

   Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu:

   a. Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan
   b. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6. Bidang Tata Kota

   Bidang Tata Kota mempunyai tugas Dinas yang meliputi perencanaan ruang, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bidang Tata Kota terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator, yaitu:

   a. Sub Koordinator Perencanaan Ruang
   b. Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang.

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebanyak 224 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 43 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 orang, PPPK Fulltime sebanyak 12 orang, PPPK Paruh Waktu sebanyak 106 orang dan tenaga Non ASN sebanyak 56 orang. Untuk melihat kapasitas secara formal maka sumber daya manusia tersebut akan dirinci dalam beberapa kelompok.

Tabel 1. Pegawai Berdasarkan Gol./Ruang Kepangkatan (PNS dan CPNS)

GOL	JUMLAH SDM (orang)				JUMLAH	
	a	b	c	d	L	P
IV	4	1	-	-	4	1
III	22	3	6	6	24	13
II	-	-	3	5	3	5
I	-	-	-	-	-	-
JUMLAH					50	

Tabel 2. Pegawai Berdasarkan Gol./Ruang Kepangkatan (PPPK Fulltime)

GOL	JUMLAH SDM (orang)	JUMLAH	
		L	P
V	11	8	3
III	1	1	-
JUMLAH		12	

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/Bidang (PNS dan CPNS)

GOL	JUMLAH SDM (orang)					JUMLAH	
	SEKRETARIAT	BINA MARGA	CIPTA KARYA	TATA KOTA	PSDA	L	P
IV	1	-	1	2	1	4	1
III	4	10	9	4	10	24	13
II	2	2	-	1	3	3	5

GOL	JUMLAH SDM (orang)					JUMLAH	
	SEKRETARIAT	BINA MARGA	CIPTA KARYA	TATA KOTA	PSDA	L	P
JUMLAH	7	12	10	7	14	50	

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/Bidang (PPPK Fulltime)

GOL	JUMLAH SDM (orang)					JUMLAH	
	SEKRETARIAT	BINA MARGA	CIPTA KARYA	TATA KOTA	PSDA	L	P
V	5	1	1	4	-	8	3
III	-	1	-	-	-	1	-
JUMLAH	5	2	1	7	14	12	

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang merupakan instrumen alat pendukung untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana ini dalam fungsi nya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai pelengkap dan sebagai instrument utama.

Yang termasuk dalam instrumen pelengkap biasanya adalah peralatan kantor kecuali perangkat komputer beserta kelengkapannya yang telah disetting dengan kebutuhan teknis masing – masing urusan. Perangkat komputer tersebut berfungsi sebagai instrument utama disamping peralatan teknis lainnya yang mendukung langsung kegiatan teknis urusan pekerjaan umum, perumahanan dan penataan ruang. Kegiatan yang memanfaatkan instrumen tersebut diantaranya adalah untuk perencanaan dan pengawasan swakelola dan pemeliharaan rutin untuk menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur yang sifatnya insidental dan dengan kebutuhan anggaran yang tidak terlalu besar.

Jika dilihat dari avaibility (ketersediaannya) maka sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan / Kondisi
1	Filling Besi	16	Baik
2	Laptop	27	Baik
3	Mesin Las Listrik	1	Baik
4	Mesin Ketik	2	Baik
5	Lemari Besi	5	Baik
6	Alat bengkel	14	Baik
7	Printer	65	Baik
8	Sound System	5	Baik
9	Alat Ukur	19	Baik
10	Alat Pemadam Kebakaran	18	Baik
11	Dump Truk	4	Baik
12	Camera	6	Baik
13	Troly Dorong	15	Baik
14	Brankas	2	Baik
15	Laptop	27	Baik
16	GPS Geodetik	1	Baik
17	Total Station	1	Baik
18	Handie Talkie	2	Baik
19	Mesin Pembersih Trotoar	1	Baik
20	Kendaraan Roda 4	25	Baik
21	Kendaraan Roda 3	4	Baik
22	Kendaraan Roda 2	35	Baik
23	Eskavator	1	Baik
24	Baby Rooler	1	Baik
25	Flat Bed Truck	1	Baik
26	Alat Survey	3	Baik
27	Pompa Air	13	Baik
28	Walles	11	Baik
29	Mesin Potong Rumput	15	Baik
30	Hydrant, Genset	5	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan / Kondisi
31	Lift	2	Baik
32	Safety Help	30	Baik
33	Alat Deteksi Tulang Beton	1	Baik
34	AC	25	Baik
35	TV	8	Baik
36	LCD Proyektor	8	Baik
37	Tangga Aluminium	1	Baik
38	Sofa + Meja (set)	4	Baik

Secara umum, hingga tahun 2025 peralatan kantor sebagai instrumen pelengkap yang ada sudah memadai namun dalam 5 (lima) tahun ke depan kebutuhan peralatan tersebut akan berkembang seiring dengan bertambahnya volume kegiatan, penyusutan nilai aset dan kebutuhan tuntutan perkembangan IPTEK serta pengaruh eksternal lainnya yang pada prinsipnya sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

F. ISU STRATEGIS (*Strategis Issued*)

Berdasarkan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun memiliki isu strategis yang harus diperhatikan. Isu strategis dapat dilihat melalui identifkasi hasil reviu faktor-faktor pelayanan perangkat daerah. Identifikasi hasil reviu faktor-faktor pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun merupakan unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun. Gambaran pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dijabarkan dalam rincian sebagai berikut:
   a) Bidang Urusan Pekerjaan Umum:
      1) Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan agar representative;
3) Peningkatan kualitas bangunan Gedung dan bangunan cagar budaya yang aman, layak dan representatif;
4) Peningkatan kompetensi bagi penyedia jasa konstruksi;
5) Peningkatan kualitas infrastruktur saluran drainase perkotaan/ lingkungan;
6) Peningkatan kualitas infrastruktur badan-badan air dan bangunan pengendali banjir sebagai upaya menurunkan genangan.

b) Bidang Urusan Penataan Ruang:
1) Peningkatan kualitas pengendalian ruang zonasi;
2) Peningkatan ketertiban bangunan gedung.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut:

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang: **"Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025".** Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Provinsi adalah tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai perangkat daerah tersebut dalam kurun waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program pembangunan jangka menengah

daerah (RPJMD) provinsi. Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja.

4. Implikasi KLHS dan RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada Penataan ran strategis. Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada Penataan ran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada. Adapun peran KLHS dalam perencanaan Penataan ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Penataan Ruang Wilayah), bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolahan lingkungan lainnya, dan menciptakan Penataan pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan Penataan ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera

direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tamping lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan Penataan ruang yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/ proses dan metodologi/ muatan perencanaan.

Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan urusan:

1) Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya akan meningkatkan estetika kota, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengguna jalan;
2) Pemeliharaan jalan/jembatan sebagai upaya mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan dengan prioritas kawasan wisata di perkotaaan;
3) Peningkatan sistem data jalan dan jembatan untuk mengakomodir perkembangan sistem inventarisasi jalan;
4) Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah;
5) Penyediaan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja;
6) Pemeliharaan Bangunan cagar budaya dan kawasan wisata, kawasan strategis daerah;
7) Penurunan kondisi dan fungsi infrastruktur saluran drainase dapat menyebabkan terjadinya banjir/genangan;
8) Penurunan kondisi dan fungsi infrastruktur sarana prasarana pengendali banjir dapat menyebabkan terjadinya banjir/genangan;
9) Pemenuhan/penyediaan Air Minum jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi masyarakat;
10) Pelaksanaan Operasional IPLT dalam memenuhi sanitasi yang layak dan aman;
11) Berdasarkan hitungan IHBI (Indeks Hijau Biru Indonesia) Nilai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik belum 20% sehingga diperlukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang saat ini masih di angka 9.91 %;

12) Pengendalian proses perijinan kesesuaian tata ruang terhadap kondisi RTRW Pemerintah Kota Madiun

G. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berikut permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.

Tabel 6. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

No	Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
1	2	3
1.	Sesuai arahan Bapak Presiden untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional pemerintah berupaya mengaktifkan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah eksisting menjadi kegiatan non sawah kecuali untuk hak atas tanah non pertanian yang telah diterbitkan dan PSN (Proyek Strategis Nasional) .	Upaya identifikasi dan inventarisasi lahan sawah eksisting di wilayah Kota Madiun dan LBS (Lahan Baku Sawah) dengan kondisi eksisting bukan merupakan sawah dalam rangka membuka moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah.
2.	Peraturan Daerah Kota Madiun tentang RTRW Tahun 2023-2043 dan Penyusunan RDTR wajib menyesuaikan data hasil inventarisasi dan identifikasi lahan sawah eksisting dan data LBS (Lahan Baku Sawah).	Upaya pemutakhiran data LBS (Lahan Baku Sawah).
3.	Penyusunan RDTR Kota Madiun wajib menyesuaikan batas wilayah Kota Madiun yang telah disepakati antara Walikota Madiun dan Bupati Madiun.	Upaya memperoleh rekomendasi Batas Wilayah Kota Madiun oleh Kemendagri mendahului penetapan permendagri tentang Batas Wilayah Kota Madiun.

No	Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
1	2	3
4.	Perizinan pemanfaatan ruang oleh masyarakat yang akan melakukan aktifitas berusaha maupun non berusaha mengalami kendala perubahan Peraturan Pemerintah tentang perizinan berusaha berbasis resiko yang berdampak pada layanan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSSRBA).	Upaya sosialisasi dan BIMTEK bagi petugas atau pemegang akun penyelenggara perizinan untuk menjalankan sistem elektronik yang mengalami *upgrade flowchart* atau diagram alir.
5.	Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan Gedung apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut: 1. Bidang Cipta Karya belum memiliki data total jumlah bangunan gedung milik Pemerintah Kota Madiun; 2. Bidang Cipta Karya tidak hanya mengerjakan pembangunan/ rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan/ rehab bangunan milik instansi vertikal yang nantinya akan diserahterimakan melalui mekanisme hibah. Apakah ketika ini dilakukan,	1. Target jumlah bangunan gedung tahun ini bersumber dari data realisasi tahun yang kemarin. Pada tahun 2024 dianggarkan untuk dilaksanakan kegiatan pendataan bangunan gedung pemerintah; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan pembangunan/rehab bangunan walaupun bukan aset Kota Madiun.

No	Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
1	2	3
	maka tidak dianggap sebagai suatu capaian kinerja, mengingat aset yang dibangun/ direhab bukan aset milik Pemerintah Kota Madiun. Pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun bukan hanya dilakukan oleh Dinas PUPR saja, akan tetapi juga kewenangan masing-masing OPD yang memiliki aset bangunan gedung. Sehingga untuk bangunan gedung yang bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR akan kesulitan melakukan pemantauan/pendataan peningkatan kondisi bangunan gedungnya mengingat tenaga teknis yang terbatas.	
6.	Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tupoksi menjalankan kegiatan untuk mengurangi potensi banjir/ genangan wilayah kota. Wilayah Kota Madiun dilintasi oleh sungai - sungai yang mana menjadi kewenangannya merupakan kewenangan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo.	Pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari BBWS Bengawan Solo dan Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Koordinasi dengan pihak terkait harus dilakukan secara bertahap.

No	Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
1	2	3
	Dikarenakan keterbatasan anggaran dan luasan wilayah maka pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan saluran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 perencanaan dan pelaksanaan teknis harus mendapatkan rekomendasi teknis ke BBWS Bengawan Solo. Sementara untuk pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 3 dan 4, perencanaan dan pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh DPUPR	

H. ISU GENDER

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 juga mengamanatkan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut Pemerintah Kota Madiun memberikan arahan kepada POKJA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk menyusun RAD PUG.

Proses Penyusunan Dokumen ARG yang pertama adalah dengan melakukan Analisis Gender dengan menyusun data terpilah gender pada setiap program/kegiatan di masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Madiun menyusun dan merencanakan anggaran yang responsif gender dengan sasaran kegiatan adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Terdapat 5 (lima) kegiatan selama tahun 2025 sebagai sampling pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender DPUPR Tahun 2025

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		KEUANGAN				%
	RESPONSIF GENDER	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota	95,80%	96,05%	34.486.731.600	39.839.288.486	39.161.105.227	678.183.259	98
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	1 Km	1 Km	2.216.740.000	2.346.050.000	2.331.779.500	14.270.500	99
2	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota	95,80%	96,05%	34.486.731.600	39.839.288.486	39.161.105.227	678.183.259	98
	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1 Km	1 Km	2.626.190.000	6.290.728.436	6.206.911.887	83.816.549	99

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		KEUANGAN				%
	RESPONSIF GENDER	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
3	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%	24.300.070.164	27.754.586.500	26.971.409.584	783.176.916	97
	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	15 Dokumen	23.550.070.164	26.945.568.500	26.186.096.204	759.472.296	97
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	22,75%	23,51%	264.295.000	196.675.000	173.702.231	22.972.769	88
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	60 Orang	60 Orang	264.295.000	196.675.000	173.702.231	22.972.769	88
5	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Terencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100%	100%	650.000.000	689.663.372	478.140.518	211.522.854	69
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	689.663.372	478.140.518	211.522.854	69

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Analisa Gender salah satunya kebijakan peningkatan terhadap perencanaan/pelaksanaan konstruksi dan pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah pada:

Program : Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

Tujuan : Memantabkan kualitas infrastruktur Kota Madiun

Tabel 8. Gender Analysis Pathway DPUPR Tahun 2025

Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Faktor Internal	Faktor Eksternal	Reformulasi	Rencana Aksi	Baseline	Indikator/ Hasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEBIJAKAN : Peningkatan terhadap perencanaan/ pelaksanaan konstruksi dan pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah	Tahun 2024 : Jumlah Kegiatan pada program pengembangan Jasa Konstruksi sebanyak 2 kali yaitu Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis sebanyak 120 orang (prosentase kehadiran 82 % laki-laki dan 18 % perempuan) dan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota sebanyak 200 orang (laki laki 80% dan perempuan 20%)	AKSES : Akses untuk kegiatan operasional pembinaan jasa konstruksi masih didominasi oleh laki-laki dan kurangnya peminat perempuan	Pelaku Jasa Konstruksi banyak dilakukan oleh laki-laki sehingga peserta yang hadir di dominasi oleh laki-laki	Kurangnya pemahaman masyarakat terutama perempuan tentang informasi jasa konstruksi	Tujuan Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam bidang konstruksi	Sertifikasi Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	Tahun 2024 : Jumlah Kegiatan pada program pengembangan Jasa Konstruksi sebanyak 2 kali yaitu Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis sebanyak 120 orang (prosentase kehadiran 82 % laki-laki dan 18 % perempuan) dan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota sebanyak 200 orang (laki laki 80% dan perempuan 20%)	Tahun 2024 : Sertifikasi Tenaga Terampil Jasa Konstruksi meningkat
KEGIATAN : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang terdaftar 100 badan usaha, 90% direkturnya dijabat oleh laki-laki	PARTISIPASI : Tingkat partipisasi kegiatan operasional pembinaan jasa konstruksi masih didominasi oleh laki-laki	Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan yang responsif gender	Kurang minat dan minimnya keterlibatan perempuan dalam bidang konstruksi		Hasil Sertifikasi : Meningkatkan kwalitas dan kompetensi sumber daya tenaga terampil (Tukang)	Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 100 orang	Terlaksananya kegiatan sertifikasi Tenaga Terampil Jasa Konstruksi

Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Faktor Internal	Faktor Eksternal	Reformulasi	Rencana Aksi	Baseline	Indikator/ Hasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN: Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Asosiasi badan usaha konstruksi sebanyak 17 asosiasi, yang semuanya dipimpin oleh laki-laki	KONTROL : Direktur Penyedia Jasa Konstruksi laki-laki lebih dominan dalam mengambil keputusan				Keluaran : Jumlah peserta sertifikasi sebanyak 80 orang		Bertambahnya Jumlah Tenaga Trampil Jasa Konstruksi yang kompetensi dari 40 orang menjadi 80 orang
Tujuan Memantabkan kualitas infrastruktur Kota Madiun	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil ada 40 orang, 90 % laki-laki dan 10 % perempuan	MANFAAT : Kurangnya keterlibatan masyarakat khusunya perempuan dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan tenaga konstruksi.				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota, sosialisasi regulasi jasa konstruksi		
	Dalam hal pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan / pekerja 90% dikerjakan oleh laki-laki					Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 225 orang		Terlaksananya kegiatan sosialisasi Regulasi Jasa Konstruksi
	Pelaku jasa konstruksi mayoritas adalah laki-laki					Hasil Sosialisasi : Meningkatkan pemahaman standart/ peraturan dan metode pelaksanaan fisik di lapangan		Bertambahnya tingkat profesionalitas tenaga ahli dalam pemahaman peraturan/ pedoman konstruksi dari 100 menjadi 200 orang
	Monitoring dan Evaluasi pembangunan gedung 85% masih didominasi oleh laki-laki							

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 - 2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Tujuan, Sasaran, serta Kebijakan Program dan Kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar untuk diimplementasikan oleh segenap Aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam memberikan Pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

dalam mendukung visi Kota Madiun **"Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera."**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kota Madiun mempunyai misi pada periode 2025-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah secara Optimal
2. Meningkatkan Aksesabilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial
3. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam Situasi yang Tertib, Aman, dan Damai
4. Meningkatkan Kerjasama antar Pemangku Kepentingan Pembangunan, baik ditingkat Daerah, Nasional maupun Internasional
5. Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Sehubungan dengan misi Kota Madiun diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu "Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Secara Optimal" dan mendukung pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu "Meningkatkan Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial". Dapat dijabarkan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun merupakan jawaban dari isu-isu strategis dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan tersbut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerjemahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun dalam mencapai cita-cita yang hendak dicapai untuk menuju masyarakat sejahtera. Adapun Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun aadalah : "**Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas."**

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Madiun dapan menjangkau dan memanfaatkan fasilitas publik yang layak untuk mendukung aktivitas ekonomi, social dan budaya.

- **Meningkatnya Akses** : Berarti perluasan jangkauan. Pembangunan tidak hanya terpusat di jalan protokol, tetapi masuk hingga ke lingkungan permukiman (seperti gang-gang kecil melalui program pavingisasi).
- **Infrastruktur Berkualitas** : Berarti pembangunan yang memenuhi standar teknis, aman, tahan lama (durabilitas tinggi), dan estetis (mempercantik kota)

2. Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Dokumen Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Tujuan dan Sasaran berfungsi sebagai arah dari kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan regulasi sumber daya yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi berupa program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan hasil analisa lingkungan baik internal maupun eksternal. Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur Berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab
2. Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan
3. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan
5. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Guna mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sasaran sebagaimana termuat dalam table berikut:

Tabel 9. Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun
Tahun 2025 - 2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026
	TUJUAN :			
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	92.49%	92.64%
	SASARAN :			
1.	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95.80 %	95.90%
2.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 %	100%
3.	Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	100%
4.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81.67 %	82.01%
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	16.97 %	16.41%

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	100 %	100%
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100 %	100%
5.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20 Indeks	4.25 Indeks

3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan agar pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud bisa lebih terarah. Adapun strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	**Sasaran 1 :** Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	Meningkatkan kondisi jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan dalam upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, meningkatkan potensi pariwisata serta ketahanan pangan	Pembangunan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan yang mendukung potensi pariwisata dan ketahanan pangan serta kemudahan mobilitas warga
	Sasaran 2 : Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Penyediaan RTH Publik di beberapa lokasi diantaranya kavling kawasan peruntukan industri, kafling kawasan perkantoran, kawasan	Rencana perubahan/sinkronisasi terhadap Peraturan Daerah RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perdagangan dan jasa dan kawasan perumahan	mengacu pada proses pembangunan serta investasi di Kota Madiun
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Meningkatkan kondisi bangunan gedung pemerintah melalui rehabilitasi dan pemeliharaan pada bangunan yang mengalami kerusakan	Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah yang layak, memenuhi standart keselamatan, kualitas dan berfungsi dengan baik
	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Melakukan pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana pengendali banjir	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur sarana dan prasarana pengendali banjir untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata
		Melakukan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Arahan peningkatan kualitas Air Bersih dilingkungan Pemukiman Kumuh
		Melakukan pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastruktur saluran drainase	Pembangunan, normalisasi, pemeliharaan infrastrukrtur saluran drainase untuk mendukung ketahanan pangan dan potensi pariwisata
		Melakukan Pengembangan layanan IPLT	Arahan pengembangan layanan IPLT secara maksimal
	Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepuasan masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tahun 2025 – 2026, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Kinerja Tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95.80 %
2.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 %
3.	Menigkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %
4.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81.67 %
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	16.97 %
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100 %
5.	Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20 Indeks

2. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur (*outcome*) sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*). Kegiatan terbagi atas sub kegiatan.

Tabel 12. Sasaran, Indikator Sasaran, dan Pagu Anggaran Tahun 2025

No	SASARAN	Indikator	Anggaran
1.	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	Rp. 39.839.288.486
2.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Rp. 1.511.538.169
3.	Menigkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	Rp. 28.977.265.050
4.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Rp. 29.794.557.700

No	SASARAN	Indikator	Anggaran
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	Rp. 8.004.500.000
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	Rp. 689.721.000
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	Rp. 993.471.390
5.	Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Rp. 18.326.374.003
	Jumlah		**Rp. 128.136.735.798,39**

Tabel 13. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator, Target dan Anggaran Tahun 2025

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1.			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan**	**81,67%**	**8.004.500.000**
	1.		**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kawasan bebas banjir/genangan**	**81,67%**	**8.004.500.000**
		1.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	4 Unit	436.310.000
		2.	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.487.760.000
		3.	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 Km	6.080.430.000
2.			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang Persentase Jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang**	**100%**	**689.721.000**

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
	2.		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum**	**100%**	**689.721.000**
		4.	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	689.721.000
3.			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT**	**100%**	**993.471.390**
	3.		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan domestik**	**100%**	**993.471.390**
		5.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	564.325.390
		6.	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	429.146.000
4.			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk**	**81,67%**	**23.926.027.000**

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
				meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir/genangan		
	4.		**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase kawasan bebas banjir/genangan**	**81,67%**	**23.926.027.000**
		7.	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000 M	7.610.476.000
		8.	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan	11.223.406.000
		9.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	12 Dokumen	939.710.000
		10.	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	4.152.435.000

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
5.			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung yang terbangun**	**100%**	**27.754.586.500**
	5.		**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi**	**100%**	**27.754.586.500**
		11.	Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Bangunan Gedung	699.190.000
		12.	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	26.945.568.500
		13.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	10 Dokumen	109.828.000

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
			Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
6.			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan strategis/ cagar budaya terbangun /terehab**	**100%**	**5.868.550.700**
	6.		**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bangunan/ gedung yang terbangun/ terehabilitasi**	**100%**	**5.868.550.700**
		14.	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	5.868.550.700
7.			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase kondisi jalan kota yang baik**	**95,80%**	**39.839.288.486**
	7.		**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**95,80%**	**39.839.288.486**
		15.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan	5 Dokumen	1.586.840.114

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
			Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		
		16.	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	2 Jembatan	23.710.000
		17.	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	2.346.050.000
		18.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	8 KM	20.924.070.000
		19.	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 KM	927.330.000
		20.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	25 Jembatan	218.980.000
		21.	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1 KM	6.290.728.436
		22.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	2 Jembatan	480.349.925
		23.	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	485.44 Km	407.970.000
		24.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Km	6.633.260.011

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
8.			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi**	**22,75%**	**1.222.678.550**
	8.		**Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten**	**22,75%**	**196.675.000**
		25.	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	196.675.000
	9.		**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten**	**100%**	**52.551.550**
		26.	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	52.551.550
	10.		**Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi**	**100%**	**973.452.000**
		27.	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	973.452.000

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
9.			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan**	**100%**	**1.511.538.169**
	11.		**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota**	**Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW**	**100%**	**689.663.372**
		28.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	689.663.372
	12.		**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW**	**100%**	**353.790.315**
		29.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	20 Dokumen	353.790.315
	13.		**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW**	**100%**	**468.084.482**
		30.	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	300 Dokumen	468.084.482

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
10.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**85 Skor**	**18.326.374.003**
	14.		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah**	**85 Skor**	**288.471.712**
		31.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	166.463.069
		32.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	122.008.643
	15.		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan**	**100%**	**4.880.218.017**
		33.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	4.880.218.017
	16.		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum**	**100%**	**233.663.000**

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
		34.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	233.663.000
	17.		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.412.165.848**
		35.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.412.165.848
	18.		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah**	**100%**	**7.706.150.990,36**
		36.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.706.150.990,36
	19.		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan**	**100%**	**3.805.704.436**
		37.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	54 Unit	1.355.956.470

No.			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
		38.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.805.029.000
		39.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	644.718.966

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

1.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Penilaian keberhasilan atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada

Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Penyusunan LKj ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategi dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2025.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila kinerja menunjukkan suatu kondisi, maka indikator kinerja merupakan alat yang memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut.

Sedangkan evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara:

- Target dengan realisasi kinerja tahun berjalan

- Realisasi dan capaian kinerja, dengan realisasi dan capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir.
- Realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra.
- Realisasi kinerja dengan standar nasional.

1.1.1. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarakan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruag Kota Madiun yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Untuk memberikan suatu penilaian atas capaian kinerja diperlukan nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, yang dibedakan atas beberapa macam kategori.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 bahwa kategori capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 14. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Capaian Realisasi	Kategori Capaian Kinerja	Bobot	Kategori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Sangat Baik/Istimewa	5	Di atas ekspektasi
2	100 %	Baik	4	Sesuai ekspektasi
3	80 % ≤ 990 %	Cukup	3	Di bawah ekspektasi
4	60 % ≤ 79 %	Kurang	2	
5	0 % ≤ 59 %	Sangat Kurang	1	

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri

1.1.2. Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 telah mencapai kategori Sangat Baik/Istimewa.

Target Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kota Madiun ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai tolak ukur kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Dokumen Perencanaan berlaku pada tahun 2025 (Renstra 2025-2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Kinerja sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Adapun realisasi dari Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1.1.2.1. Tujuan

a. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan target Tahun 2025

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Target Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	92.49%	95.17%	102.90%

b. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan 4 Tahun Terakhir

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan 4 Tahun Terakhir

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	-	91,55 %	91,70 %	91,87 %	92,34 %	102.90 %

Grafik capaian kinerja pada tujuan "Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas" sebagai berikut.

Gambar 1. Grafik Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas

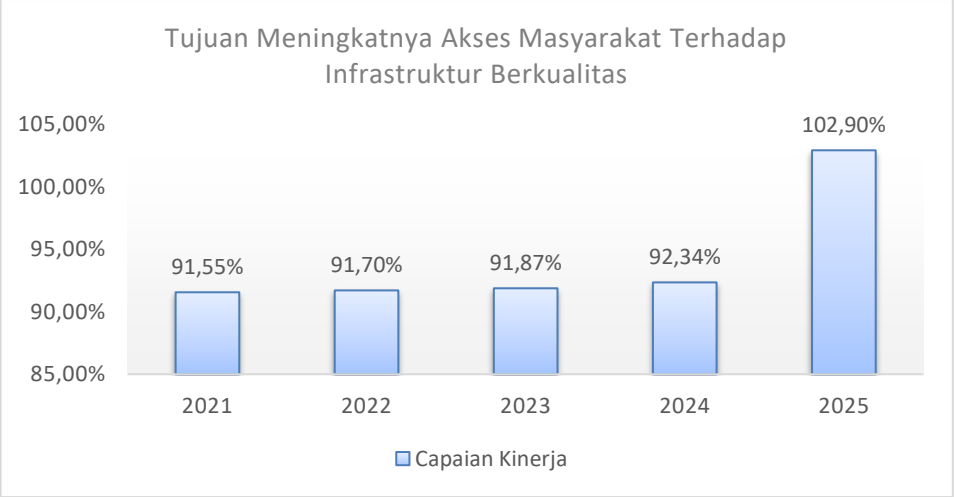

c. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Target Akhir Renstra

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Target Akhir Renstra

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	92.64%	95.17%	102.73%

d. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Provinsi/Nasional

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Provinsi/Nasional

NO	TUJUAN	INDIKATOR	KOTA MADIUN	PROVINSI	NASIONAL
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	95.17%	N/A	N/A

e. Analisis Atas Ketercapaian Kinerja Baik Keberhasilan Maupun Kegagalan Serta Rencana Tindak Lanjut Kedepan

Faktor pendorong:

1. Kebijakan dan regulasi yang mendukung;
2. Perencanaan infrastruktur yang terintegrasi;
3. Koordinasi antar instansi yang baik.

Faktor penghambat:

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Partisipasi masyarakat yang kurang optimal.

Rencana tindak lanjut

1. Peningkatan partisipasi masyarakat;
2. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Optimalisasi pemeliharaan infrastruktur.

Upaya-upaya yang dilakukan DPUPR dalam pencapaian target kinerja:

1. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah terkait, serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
2. Mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui APBD, bantuan pemerintah pusat, serta skema kerja sama dengan pihak lain;
3. Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

1.1.2.2. Sasaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mendukung Tujuan "Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas" telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja.

1.1.2.2.1. Sasaran 1 : "Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab"

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan target Tahun 2025

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan Target Tahun 2025

No.	Sasaran 1	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab	Persentase Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab	95.80%	96.05%	100.3%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan 4 Tahun Terakhir

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan 4 Tahun Terakhir

No.	Sasaran 1	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab	Persentase Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab	94,03 %	94,60 %	95,03 %	95,52 %	96,01 %	96,05 %

Grafik capaian kinerja pada sasaran "Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab" sebagai berikut.

Gambar 2. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab

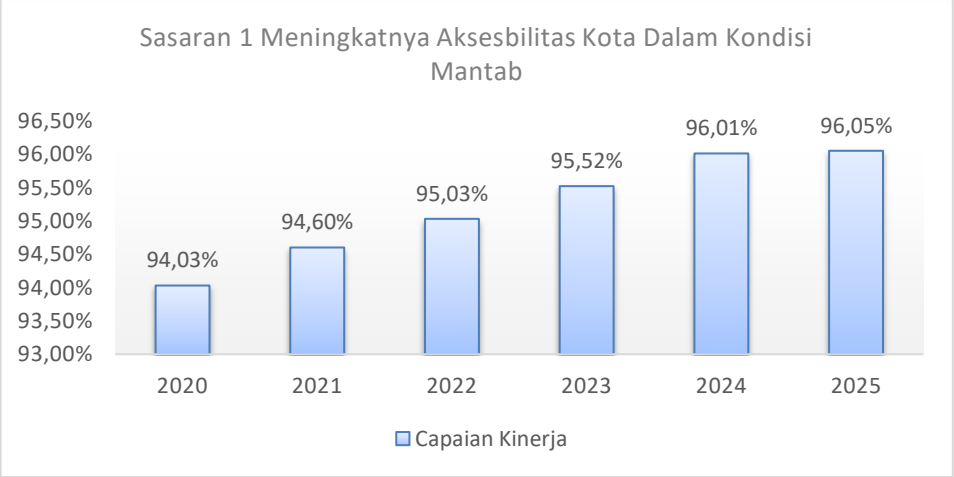

d. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2026

No.	Sasaran 1	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab	Persentase Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab	95,90%	96,05%	100,16%

e. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan Provinsi/Nasional

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 dengan Provinsi/ Nasional

NO	Sasaran 1	INDIKATOR	KOTA MADIUN	PROVINSI	NASIONAL
1.	Meningkatnya Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab	Persentase Aksesbilitas Kota Dalam Kondisi Mantab	96,05%	N/A	N/A

f. Analisis Atas Ketercapaian Kinerja Baik Keberhasilan Maupun Kegagalan Serta Rencana Tindak Lanjut Kedepan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi lebih besar daripada target.

Faktor keberhasilan ketercapaian kinerja:

- Adanya Sumber Daya Manusia yang cukup;
- Adanya kerja tim (team work) yang solid;
- Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Faktor penghambat ketercapaian kinerja:

- Kurangnya tenaga teknis bidang infrastruktur;
- Kurangnya sarana penunjang pelaksanaan tugas.

Rencana tindak lanjut dalam mencapai target kinerja:

- Memfasilitasi tenaga kerja untuk melaksanakan pelatihan/sertifikasi jasa konstruksi;
- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas.

Upaya-upaya yang dilakukan DPUPR dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

DPUPR menjaga aksesbilitas kota dalam kondisi mantab telah dilakukan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun yaitu :

- Kondisi jalan yang baik dilaksanakan dengan sistem pemeliharaan rutin;
- Kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala;
- Kondisi jalan rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau peningkatan jalan;
- Dukungan anggaran yang disediakan.

Pencapaian sasaran tersebut diatas didukung 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, 1 (satu)

kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dan 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebanyak 14 dokumen
- Sub Kegiatan Penggantian Jembatan sebanyak 3 jembatan
- Sub Kegiatan Pembangunan Jalan sebanyak 2 paket
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sebanyak 5 paket
- Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar sebanyak 4 paket
- Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur sebanyak 113 paket
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan sebanyak 2 paket
- Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sebanyak 4 Paket
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebanyak 22 paket

1.1.2.2.2. Sasaran 2 : "Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan"

a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan target Tahun 2025

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan Target Tahun 2025

No.	Sasaran 2	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan 4 Tahun Terakhir

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan 4 Tahun Terakhir

No.	Sasaran 2	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025 - 2026

No.	Sasaran 2	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

d. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan Provinsi/Nasional

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 dengan Provinsi/ Nasional

NO	Sasaran 2	INDIKATOR	KOTA MADIUN	PROVINSI	NASIONAL
1.	Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan	Persentase Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai Ketentuan	100%	N/A	N/A

e. Analisis Atas Ketercapaian Kinerja Baik Keberhasilan Maupun Kegagalan Serta Rencana Tindak Lanjut Kedepan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan capaian kinerja tahun 2025 terealisasi 100%.

Faktor keberhasilan ketercapaian kinerja:

- Tertib administrasi dan kepatuhan para pengembang perumahan dalam melaksanakan penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum;
- Tertib administrasi dan kepatuhan para investor dalam berinvestasi untuk pewujudan pemanfaatan ruang di Kota Madiun telah sesuai peraturan yang berlaku;
- Tertib administrasi dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perizinan pembangunan untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang;
- Konsistensi Pemerintah Kota terhadap pemanfaatan ruang dan terhadap RTRW.

Faktor penghambat ketercapaian kinerja:

- Kurangnya tenaga teknis struktur bangunan;
- Kurangnya sarana penunjang pelaksanaan tugas.

Rencana tindak lanjut dalam mencapai target kinerja:

- Mengadakan sosialisasi dan forum konsultasi publik terkait RTRW;
- Bekerjasama dengan instansi akademisi untuk mendapatkan produk RTRW yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Membuka klinik konsultasi kesesuaian tata ruang/ RTRW bagi masyarakat, pengembang, dan pengusaha yang ingin membangun.

Upaya-upaya yang dilakukan DPUPR dalam pencapaian target kinerja:

- Penyusunan dan pemutakhiran dokumen tata ruang;
- Pengembangan sistem informasi tata ruang;

- Peningkatan koordinasi antar instansi.

1.1.2.2.3. Sasaran 3: "Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah"

a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan target Tahun 2025

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan Target Tahun 2025

No.	Sasaran 3	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan 4 Tahun Terakhir

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan 4 Tahun Terakhir

No.	Sasaran 3	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025 - 2026

No.	Sasaran 3	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

d. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan Provinsi/Nasional

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 dengan Provinsi/ Nasional

NO	Sasaran 3	INDIKATOR	KOTA MADIUN	PROVINSI	NASIONAL
1.	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	N/A	N/A

e. Analisis Atas Ketercapaian Kinerja Baik Keberhasilan Maupun Kegagalan Serta Rencana Tindak Lanjut Kedepan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2025 terealisasi 100% sesuai dengan target, dapat dijelaskan bahwa semua kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase Bangunan Gedung Sesuai Dengan Ketentuan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Faktor keberhasilan ketercapaian kinerja:

- Perencanaan teknis yang matang;
- Pengawasan konstruksi yang efektiff;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Faktor penghambat ketercapaian kinerja:

- Masih banyak bangunan gedung pemerintahan yang umur bangunannya sudah lama, sehingga memerlukan banyak biaya pemeliharaan
- Perubahan Regulasi atau Standar Teknis
- Keterbatasan Data dan Informasi Bangunan Gedung

Rencana tindak lanjut dalam mencapai target kinerja:

- Menetapkan skala prioritas terhadap bangunan gedung pemerintah yang memerlukan rehabilitasi, perbaikan, atau peningkatan kualitas berdasarkan kondisi fisik dan tingkat kerusakan bangunan;
- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi di bidang perencanaan, manajemen konstruksi, dan pengawasan bangunan gedung;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi bangunan gedung pemerintah serta pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi untuk memastikan target kinerja dapat tercapai.

Upaya-upaya yang dilakukan DPUPR dalam pencapaian target kinerja:

- Memastikan setiap pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah memenuhi standar teknis, termasuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses;
- Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap bangunan gedung pemerintah untuk menjaga kondisi bangunan tetap baik dan berfungsi optimal;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dan kondisi bangunan gedung pemerintah guna memastikan pencapaian target kinerja.

1.1.2.2.4. Sasaran 4 : "Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan

a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan target Tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan Target Tahun 2025

No.	Sasaran 4	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81.67 %	81.77%	100.2%
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	16.97 %	16.68%	101.7%
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	100 %	100 %	100 %
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100 %	100 %	100 %

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan 4 Tahun Terakhir

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan 4 Tahun Terakhir

No.	Sasaran 4	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	90,40 %	80,03 %	80,06 %	80,09 %	80,12 %	81,77 %
		Persentase kawasan	-	19,30 %	18,26 %	17,91 %	17,17 %	16,68 %

No.	Sasaran 4	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		rawan banjir/ genangan						
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	-	98,14 %	98,17 %	100%	100%	100%
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	-	-	-	-	-	100%

Grafik capaian kinerja pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan" sebagai berikut.

Gambar 3. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan - Indikator Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik

Gambar 4. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan - Indikator Persentase Kawasan Rawan Banjir/ Genangan

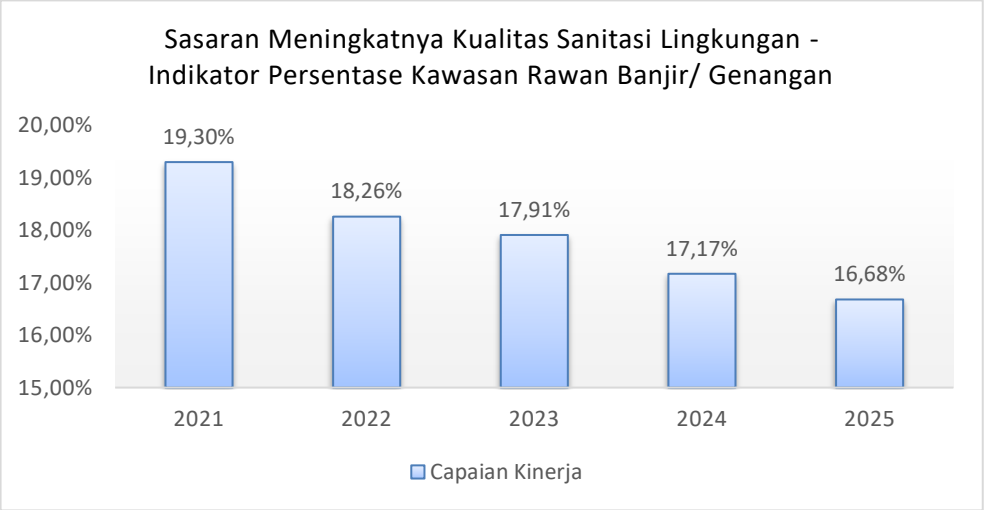

Gambar 5. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan - Indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Jaringan Air Minum

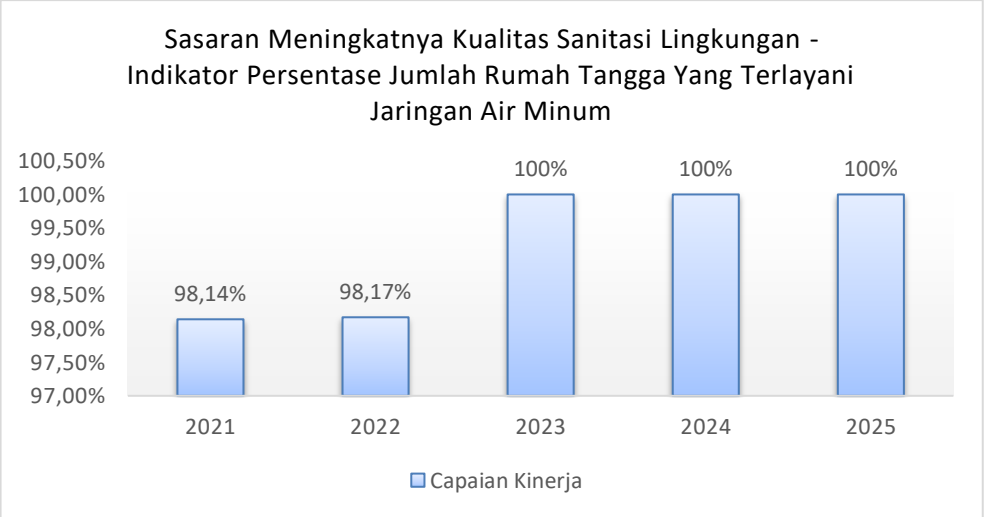

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025 - 2026

No.	Sasaran 4	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	80,18%	81,77%	101,98%
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	16,41%	16,68%	101,65%
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	100%	100%	100%
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100%	100%	100%

d. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan Provinsi/Nasional

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 dengan Provinsi/ Nasional

NO	Sasaran 4	INDIKATOR	KOTA MADIUN	PROVINSI	NASIONAL
1.	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81,77%	N/A	N/A
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	16,68%	N/A	N/A
		Persentase jumlah rumah tangga yang	100%	N/A	N/A

NO	Sasaran 4	INDIKATOR	KOTA MADIUN	PROVINSI	NASIONAL
		terlayani jaringan air minum			
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100%	N/A	N/A

e. Analisis Atas Ketercapaian Kinerja Baik Keberhasilan Maupun Kegagalan Serta Rencana Tindak Lanjut Kedepan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi lebih besar daripada target.

Faktor keberhasilan ketercapaian kinerja:

- Perencanaan sanitasi yang terintegrasi;
- Dukungan teknologi dan inovasi;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, kebersihan, kenyamanan lingkungannya.

Faktor penghambat ketercapaian kinerja:

- Adanya permukiman yang padat dan tidak terencana;
- Keterbatasan lahan;
- Kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung.

Rencana tindak lanjut dalam mencapai target kinerja:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi;
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- Penanganan kawasan permukiman dengan sanitasi kurang layak.

Upaya-upaya yang dilakukan DPUPR dalam pencapaian target kinerja:

- Penanganan kawasan permukiman dengan sanitasi kurang layak;
- Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- Melakukan pendataan dan pemutakhiran data terkait kondisi sanitasi lingkungan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi program.

1.1.2.2.5. Sasaran 5 : "Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan target Tahun 2025

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan Target Tahun 2025

No.	Sasaran 5	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20 Indeks	4.38 Indeks	104%

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan 4 Tahun Terakhir

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan 4 Tahun Terakhir

No.	Sasaran 5	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2.93 Indeks	3.44 Indeks	3.22 Indeks	3.94 Indeks	4.20 Indeks	4.38 Indeks

Grafik capaian kinerja pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan Publik" sebagai berikut.

Gambar 6. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran 5	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.25 Indeks	4.38 Indeks	103,06%

d. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan Provinsi/Nasional

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5 dengan Provinsi/ Nasional

NO	Sasaran 5	INDIKATOR	KOTA MADIUN	PROVINSI	NASIONAL
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.38 Indeks	N/A	N/A

e. Analisis Atas Ketercapaian Kinerja Baik Keberhasilan Maupun Kegagalan Serta Rencana Tindak Lanjut Kedepan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi lebih besar daripada target.

Faktor keberhasilan ketercapaian kinerja:

- Regulasi yang jelas terkait standar pelayanan publik dan kebijakan internal yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten;
- Transparansi informasi melalui website resmi, media sosial, dan layanan PPID.

Faktor penghambat ketercapaian kinerja:

- Masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan layanan digital yang disediakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun;
- Kurangnya sarana penunjang pelaksanaan tugas.

Rencana tindak lanjut dalam mencapai target kinerja:

- Menyusun dan memperbarui SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi;
- Memastikan keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengoptimalkan website dan media sosial resmi sebagai kanal informasi yang transparan.

Upaya-upaya yang dilakukan DPUPR dalam pencapaian target kinerja:

- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
- Penanganan pengaduan masyarakat;
- Monitoring dan evaluasi pelayanan.

1.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1.2.1. Realisasi Anggaran

Tabel 39. Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	Rp. 39.839.288.486	Rp. 39.161.105.227	98,30%
Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Rp. 1.511.538.169	Rp. 1.066.986.096	70,59%
Menigkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	Rp. 28.977.265.050	Rp. 27.970.704.723	96,53%
Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Rp. 29.794.557.700	Rp. 28.069.571.431	94,21%
	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	Rp. 8.004.500.000	Rp. 7.351.199.780	91,84%
	Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	Rp. 689.721.000	Rp. 643.279.357	93,27%
	Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	Rp. 993.471.390	Rp. 934.608.679	94,08%
Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Rp. 18.326.374.003	Rp. 16.297.869.110	88,93%
TOTAL		**Rp. 128.136.735.798,39**	**Rp. 121.495.324.403**	**94,82%**

Berdasarkan Tabel 39, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 121.495.324.403,00 dari alokasi anggaran Rp. 128.136.735.798,00 atau mencapai 94,82%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah berjalan

sesuai dengan perencanaan serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Secara umum, realisasi anggaran pada seluruh sasaran strategis berada pada kategori tinggi. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Kota Dalam Kondisi Mantap sebesar 98,30%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.

Sementara itu, realisasi anggaran terendah terdapat pada sasaran Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Tata Ruang Yang Sesuai Ketentuan sebesar 70,59%. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian kebutuhan riil.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran yang tinggi mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 40. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**8.004.500.000**	**7.351.199.780**	91,84%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**8.004.500.000**	**7.351.199.780**	91,84%
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	436.310.000	431.771.861	98,96%
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.487.760.000	1.202.650.100	80,84%
Normalisasi/Restorasi Sungai	6.080.430.000	5.716.777.819	94,02%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**689.721.000**	**643.279.357**	93,27%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**689.721.000**	**643.279.357**	93,27%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	689.721.000	643.279.357	93,27%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**993.471.390**	**934.608.679**	94,08%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**993.471.390**	**934.608.679**	94,08%
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	564.325.390	545.301.999	96,63%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	429.146.000	389.306.680	90,72%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**23.926.027.000**	**22.370.998.166**	93,50%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**23.926.027.000**	**22.370.998.166**	93,50%
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	7.610.476.000	6.990.375.557	91,85%
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	11.223.406.000	10.886.526.386	97,00%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	939.710.000	880.122.689	93,66%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	4.152.435.000	3.613.973.534	87,03%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**27.754.586.500**	**26.971.409.584**	97,18%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**27.754.586.500**	**26.971.409.584**	97,18%
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	699.190.000	691.215.000	98,86%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	26.945.568.500	26.186.096.204	97,18%
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	109.828.000	94.098.380	85,68%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**5.868.550.700**	**5.698.573.265**	97,10%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**5.868.550.700**	**5.698.573.265**	97,10%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.868.550.700	5.698.573.265	97,10%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**39.839.288.486**	**39.161.105.227**	98,30%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**39.839.288.486**	**39.161.105.227**	98,30%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.586.840.114	1.466.933.848	92,44%
Penggantian Jembatan	23.710.000	9.980.000	42,09%
Pembangunan Jalan	2.346.050.000	2.331.779.500	99,39%
Pemeliharaan Berkala Jalan	20.924.070.000	20.869.797.537	99,74%
Pelebaran Jalan Menuju Standar	927.330.000	914.726.327	98,64%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	218.980.000	217.011.800	99,10%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	6.290.728.436	6.206.911.887	98,67%
Pemeliharaan Berkala Jembatan	480.349.925	473.978.701	98,67%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	407.970.000	405.656.065	99,43%
Pemeliharaan Rutin Jalan	6.633.260.011	6.264.329.562	94,44%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**1.222.678.550**	**999.295.139**	81,73%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**196.675.000**	**173.702.231**	88,32%
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	196.675.000	173.702.231	88,32%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**52.551.550**	**51.446.400**	97,90%
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	52.551.550	51.446.400	97,90%
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**973.452.000**	**774.146.508**	79,53%
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	973.452.000	774.146.508	79,53%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**1.511.538.169**	**1.066.986.096**	70,59%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**689.663.372**	**478.140.518**	69,33%
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	689.663.372	478.140.518	69,33%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**353.790.315**	**288.074.061**	81,43%
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	353.790.315	288.074.061	81,43%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	**468.084.482**	**300.771.517**	64,26%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	468.084.482	300.771.517	64,26%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**18.326.374.003**	**16.297.869.110**	88,93%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**288.471.712**	**280.719.501**	97,31%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.463.069	163.182.138	98,03%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122.008.643	117.537.363	96,34%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.880.218.017**	**4.217.156.263**	86,41%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.880.218.017	4.217.156.263	86,41%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**233.663.000**	**232.218.052**	99,38%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.663.000	232.218.052	99,38%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.412.165.848**	**1.375.892.765**	97,43%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.412.165.848	1.375.892.765	97,43%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**7.706.150.990,36**	**6.442.562.800**	83,60%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.706.150.990,36	6.442.562.800	83,60%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.805.704.436**	**3.769.319.729**	99,04%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.355.956.470	1.354.546.250	99,90%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.805.029.000	1.771.700.000	98,15%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	644.718.966	643.073.479	99,74%
TOTAL	**128.136.735.798,39**	**121.495.324.403,00**	**94,82%**

Berdasarkan Tabel 40, total alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 128.136.735.798,39 dengan realisasi sebesar Rp. 121.495.324.403,00 atau mencapai 94,80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah berjalan efektif dan efisien dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi.

1.2.2. Efisiensi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun tentunya didukung oleh sumber daya baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sarana Prasarana maupun Sumber Daya Anggaran. Sumber daya anggaran digunakan sebagai pendukung operasional program dan kegiatan sehingga menghasilkan sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi output program dan efisiensi RO meliputi: capaian output program, capaian RO, pagu anggaran, dan realisasi anggaran.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Sedangkan efisiensi dihitung

dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran yang seharusnya didefinisikan sebagai jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Untuk penilaian SMART (*System Monitoring and Evaluation Kinerja Terpadu)* Satker, yang diperhitungkan adalah efisiensi RO (apabila data realisasi anggaran RO tersedia) atau efisiensi KRO (apabila data realisasi anggaran RO tidak tersedia).

Rumus perhitungan efisiensi RO level satker (data realisasi anggaran tidak tersedia) adalah sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^{m}\left(\left(\mathrm{AAKRO_j} \times \left(\prod_{i=1}^{n} \mathrm{CRO_{ji}}\right)^{\frac{1}{n}}\right) - \mathrm{RAKRO_j}\right)}{\sum_{j=1}^{m}(\mathrm{AAKRO_j})} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO}	: Efisiensi RO tingkat satuan kerja
$AAKRO_j$	: Alokasi anggaran KRO $_j$
$RAKRO_j$	: Realisasi anggaran KRO $_j$
CRO_{ji}	: Capaian RO $_i$ pada KRO $_j$
m	: Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
n	: Jumlah RO pada suatu KRO

Tabel 41. Perhitungan E_{RO} Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran
	1	2	3	4	5=(4/3)x100	6	7	8=5x6	9=8-7
1.	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,80%	96,05%	100,3%	Rp 39.839.288.486	Rp 39.161.105.227	Rp 39.943.253.226,3	Rp 782.147.999,3
2.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100%	100%	100%	Rp 1.511.538.169	Rp 1.066.986.096	Rp 1.511.538.169,0	Rp 444.552.073,0
3.	Menigkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	Rp 28.977.265.050	Rp 27.970.704.723	Rp 28.977.265.050,0	Rp 1.006.560.327,0
4.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81,67%	81,77%	100,1%	Rp 29.794.557.700	Rp 28.069.571.431	Rp 29.831.039.342,8	Rp 1.761.467.911,8
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	16,97%	16,68%	101,7%	Rp 8.004.500.000	Rp 7.351.199.780	Rp 8.140.576.500,0	Rp 789.376.720,0

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran
	1	2	3	4	5=(4/3)x100	6	7	8=5x6	9=8-7
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	100%	100%	100%	Rp 689.721.000	Rp 643.279.357	Rp 689.721.000,0	Rp 46.441.643,0
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100%	100%	100%	Rp 993.471.390	Rp 934.608.679	Rp 993.471.390,0	Rp 58.862.711,0
5	Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20 Indeks	4.38 Indeks	104%	Rp 18.326.374.003	Rp 16.297.869.110	Rp 19.059.428.963,1	Rp 2.761.559.853,1
	Total					Rp 128.136.735.798	Rp 121.495.324.403	Rp 129.146.313.666	Rp 7.650.989.263
	Efisiensi = (total 7/total 6) x 100					**94,82%**			

1.3. PEMANFAATAN DATA KINERJA SEBAGAI ACUAN PERENCANAAN

1.3.1 Analisis Data Kinerja Sebagai Acuan Perencanaan Tahun Berikutnya

Data capaian kinerja merupakan instrumen utama dalam penetapan perencanaan tahun berikutnya, selain berfungsi sebagai catatan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya data capaian kinerja, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana target telah tercapai, faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat serta peluang yang perlu dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Pemanfaatan data capaian kinerja dalam perencanaan tahun berikutnya memberikan manfaat penting, antara lain:

1. **Menjamin perencanaan yang realistis dan terukur**, dengan target berbasis tren capaian sebelumnya.
2. **Menguatkan akuntabilitas**, karena setiap target memiliki dasar yang jelas.
3. **Memfokuskan intervensi**, melalui identifikasi indikator yang perlu diperbaiki, dipertahankan, atau ditingkatkan.
4. **Mendorong perbaikan berkelanjutan**, sebagai dasar peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja yang diperoleh tahun berjalan menjadi rujukan utama dalam menetapkan target tahun berikutnya. Dengan demikian, setiap target baru tidak hanya mencerminkan harapan, tetapi juga memiliki dasar empirik yang jelas. Adapun keterkaitan capaian tahun 2020–2025 dengan target tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Data Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Capaian					Target 2026	Keterangan Dasar penetapan target 2026
	2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase tingkat kondisi jalan	94.60 %	95.03 %	95.52 %	96.01 %	96.05 %	95.90 %	Menghitung panjang jalan kota yang

Indikator Kinerja	Capaian					Target 2026	Keterangan Dasar penetapan target 2026
	2021	2022	2023	2024	2025		
kota yang mantab							dalam kondisi baik dan sedang
Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mengevaluasi dan menghitung ruang terbangun yang telah sesuai RTRW
Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung dengan berpedoman pada aturan yang berlaku
Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	80.05 %	80.08 %	80.10 %	81.03 %	81.77 %	82,01 %	Menghitung luas infrastruktur saluran drainase yang terbangun
Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	19.30 %	18.26 %	17.91 %	17.17 %	16.68 %	16.41 %	Menghitung luas infrastruktur saluran drainase yang terbangun

Indikator Kinerja	Capaian					Target 2026	Keterangan Dasar penetapan target 2026
	2021	2022	2023	2024	2025		
							yang dapat mengurangi genangan pada kawasan tertentu
Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2025 – 2026 terdapat perubahan nama indikator kinerja menjadi "**Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Jaringan Air Minum**"
Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja [2025]	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	Indikator Kinerja Baru di Tahun 2025
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	Perubahan nama indikator kinerja di tahun 2026

Indikator Kinerja	Capaian					Target 2026	Keterangan Dasar penetapan target 2026
	2021	2022	2023	2024	2025		
limbah domestik [2026]							
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.44 indeks	3.22 indeks	3.94 indeks	4.20 indeks	4.38 indeks	4.25 indeks	Mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik serta memastikan kepuasan masyarakat

Berdasarkan tabel data capaian kinerja tahun 2021 – 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun secara umum menunjukkan capaian yang baik dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun secara konsisten mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam transformasi infrastruktur berkualitas.

Tahun 2025 dan Tahun 2026 indikator "Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Kebutuhan Air Minum" terdapat perubahan nama indikator menjadi "Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Jaringan Air Minum". Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat perubahan indikator "Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja", di Tahun 2026 menjadi "Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik". Perubahan nama indikator ini dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan dan indikator pendukung yang sudah tidak berlaku.

1.3.2 INOVASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki dua inovasi dengan judul Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) dan SIKAP BADUNG (Sistem Informasi dan Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung).

1. Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi)

   Ditinjau dari konsep smart city yang dirintis Pemerintah Kota Madiun, kondisi topografi dan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya serta berkurangnya areal resapan yang dapat memicu terjadinya genangan air bahkan banjir ketika musim hujan di Kota Madiun, maka dari itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun membuat system saluran tertutup yang disebut sebagai inovasi Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) yang merupakan inovasi baru untuk mengatasi hal tersebut. Inovasi ini tidak hanya sekedar membangun saluran drainase sebagai saluran air, tetapi juga memiliki fungsi lain seperti penanganan banjir, resapan, instalasi kabel bawah tanah atau dukting, fungsi pelayanan kepada pengguna jalan hingga fungsi estetika atau keindahan yang kemudian memunculkan manfaat ekonomi. Di dalam konsep inovasi Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) dibangun dengan dilengkapi beberapa elemen pendukung. Adapun elemen dari inovasi ini, yaitu adanya bak control dengan sumur resapan, sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) atau ducting, dan diatas bangunan drainase ditutup dengan area pedestrian.

   Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) merupakan inovasi pembangunan saluran drainase dengan menggunakan sistem saluran drainase tertutup yang tetap mempertahankan nilai unsur estetika dan kemanfaatan ekonomi. Tujuan dari program inovasi ini untuk mengatasi permasalahan terjadinya genangan air bahkan banjir akibat berkurangnya areal resapan ketika musim penghujan di Kota Madiun. Selain berfungsi sebagai penanganan genangan air dan banjir, inovasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pencemaran air yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, penumpukan sampah akibat membuang sampah sembarangan di area saluran drainase dan mengatasi kondisi lingkungan

yang terlihat kumuh dan tidak memiliki nilai estetika dengan pembangunan area pedestrian di atas saluran drainase.

2. SIKAP BADUNG (Sistem Informasi dan Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan sebelum memulai pembangunan, sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Layanan ini penting untuk memastikan bahwa bangunan yang akan didirikan telah memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan fungsi sesuai peraturan.

Selama ini, proses pengurusan PBG di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dilakukan secara tatap muka di kantor pelayanan. Sistem ini dianggap sebagai cara konvensional yang sudah lama digunakan, tetapi mulai dianggap tidak efektif, terutama di era digital.

Di era digital yang semakin berkembang pesat, kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, mudah diakses, dan responsif menjadi semakin tinggi. Pemerintah dan berbagai instansi pelayanan publik dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu platform komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya Kota Madiun adalah WhatsApp. WhatsApp menjadi media komunikasi yang efektif dan efisien untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Platform ini memiliki keunggulan berupa kemudahan penggunaan, jangkauan luas, serta fitur-fitur interaktif seperti pesan teks, gambar, dokumen, dan suara yang memungkinkan komunikasi dua arah secara real-time.

Dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pelayanan PBG yang dilakukan secara tatap muka, kini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun membuat inovasi SIKAP BADUNG (Sistem Informasi dan Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung) yang merupakan pengembangan dari inovasi SIP BG WARIS (Sistem Informasi Persetujuan

Bangunan Gedung Via WhatsApp dan Gratis). Dengan adanya inovasi SIKAP BADUNG ini diharapkan memudahkan masyarakat Kota Madiun dalam berkonsultasi tentang pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBJ).

Penerapan layanan digital, seperti digitalisasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tidak hanya mendukung efisiensi pelayanan publik, tetapi juga menjadi langkah strategis yang selaras dengan Visi Kota Madiun "Madiun Maju Mendunia" yang sejalan dengan visi besar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 yang juga mengusung tema "Madiun Maju Mendunia" untuk mendukung cita-cita besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia emas Tahun 2045 sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Implementasi Inovasi SIKAP BADUNG juga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Asta Karya dalam mewujudkan visi Kota Madiun. Inovasi SIKAP BADUNG telah memberikan layanan secara efisien, transparan dan terjangkau. Hal ini sesuai dengan Asta Karya ke – 2 "Madiun Kota Melayani".

Berkenaan dengan isu internasional dalam Sustainable Development Goals (SDG's) 2025, Inovasi SIKAP BADUNG merupakan bentuk nyata transformasi digital yang mendukung tercapainya SDG 9 "Industry, Innovation and Infrastructure".

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi tahun 2025 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa dari target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen encana Strategis Tahun 2025 – 2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja, semua sasaran telah tercapai dengan kategori capaian Sangat Baik/Istimewa. Salah satu indikator yang juga ada di tahun sebelumnya, yaitu tingkat kondisi jalan kota yang mantab, mengalami peningkatan 0.04% dari 96.01% menjadi 96.05%, yang menunjukkan konsistensi kualitas dalam tingkat kondisi jalan yang mantab. Sedangkan untuk realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp121.495.324.403,00 dari pagu Rp128.136.735.798,00 atau sebesar 94.82% yang mencerminkan tingkat serapan anggaran yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisa nilai efisiensi anggaran diperoleh data bahwa meskipun semua target sasaran telah tercapai dengan kategori Sangat Baik/Istimewa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara **"Efisien"**, dengan dukungan capaian kinerja yang optimal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun akan terus melakukan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program agar efektivitas dan efisiensi kinerja dapat terus ditingkatkan.

B. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam rangka pencapaian target yang telah ditentukan, dapat disimpulkan secara umum terdapat permasalahan diantaranya:

- Bidang Urusan Pekerjaan Umum:
    1) Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan perangkat daerah;
    2) Meningkatnya jumlah penggunan jalan menyebabkan kondisi jalan dan jembatan menurun;
    3) Masih perlunya peningkatan dan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat sebagai tempat pedestrian untuk penunjang aktivitas masyarakat;
    4) Kurang optimalnya pemeliharaan jembatan yang menghubungkan Kota Madiun dengan daerah sekitar;
    5) Belum optimalnya kualitas bangunan Gedung pemerintah;
    6) Masih rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum;
    7) Belum optimalnya infrastruktur drainase perkotaan;
    8) Belum optimalnya infrastruktur badan-badan air dan bangunan pengendali banjir;
- Bidang Urusan Penataan Ruang:
    1) Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi peruntukan Penataan Ruang
    2) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
- Permasalahan Gender:

  Belum meratanya penyediaan aksesbilitas kota yang merata, nyaman dan *responsive gender*.

C. UPAYA MENINGKATKAN KINERJA

Langkah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas untuk peningkatan kinerja diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada pegawai agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam urusan pekerjaan umum;
3. Melakukan modernisasi dalam manajemen infrastruktur;

4. Melaksanakan audit lapangan rutin untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan;
5. Mengintegrasikan pengaduan masyarakat melalui aplikasi dengan sistem penanganan cepat (*quick response*) untuk lubang jalan atau saluran air tersumbat;
6. Melakukan normalisasi saluran air yang terintegrasi antar wilayah untuk mengatasi genangan air di titik-titik padat penduduk saat musim hujan;
7. Memastikan pembangunan infrastruktur memberikan rasa aman bagi semua gender dan usia termasuk penyandang disabilitas;
8. Melakukan peninjauan lapangan secara mendalam sebelum dan sesudah proyek untuk memastikan kualitas material sesuai dengan spesifikasi biaya yang dikeluarkan (*value for money*).

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan umum dan penataan ruang secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Madiun, 13 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Madiun

Dwi Setyo Nugroho, S.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 197706102005011005

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja Tahun 2025

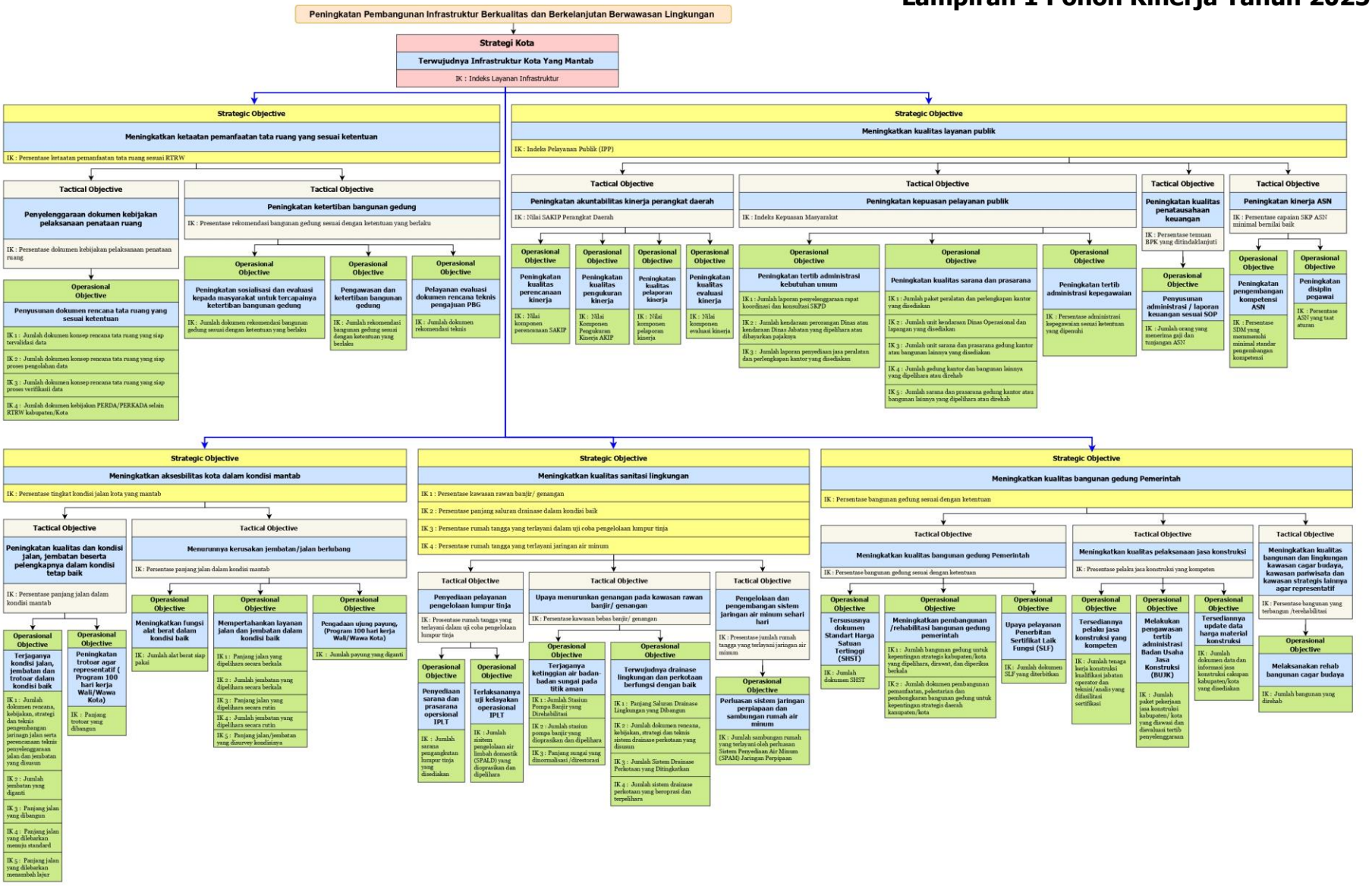

Lampiran 2 Matriks Renstra Tahun 2025 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Mantab																		
	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Persentase menurunnya kawasan rawan banjir/ genangan	1	3	2			**Program Pengeloaan Sumber Daya Air (SDA)**	Persentase berfungsinya bangunan pengendali banjir untuk meningkatkan kawasan bebas banjir / genangan	17,34%	18,04%	7.538.940.000	17,61%	14.100.000.000	17,61%	14.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	2	02.01		Kegiatan Pengeloalan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase kawasan bebas banjir/genangan		82,66%	7.538.940.000	83,03%	14.100.000.000	83,59%	14.100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1	3	2	02.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi		4 unit	639.460.000	4 unit	275.000.000	4 unit	275.000.000		
			1	3	2	02.01	85	Operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara		1 unit	805.260.000	1 unit	1.225.000.000	1 unit	1.225.000.000		
			1	3	2	02.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/ direstorasi		1 km	6.094.220.000	1 km	7.025.000.000	1 km	7.025.000.000		
			2	3	2	02.01	98	Peningkatan Stasiun pompa banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan		1 unit		1 unit	5.025.000.000	1 unit	5.025.000.000		
			2	3	2	02.01	25	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air / bendung pengendali banjir yang dibangun		1 unit		1 unit	550.000.000	1 unit	550.000.000		
	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	1	3	3			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	Persentase jumlah jaringan sambungan rumah yang terpasang	100%	0,23%	598.476.100	0,23%	275.000.000	0,23%	275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1	3	3	02.01		Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah/kota	Jumlah Rumah Tangga yang belum terlayani kebutuhan jaringan air minum		100 SR	598.476.100	100 SR	275.000.000		275.000.000		
			1	3	3	02.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		100 SR	598.476.100	100 SR	275.000.000	100 SR	275.000.000		
	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Persentase meningkatnya pelayanan dasar limbah domestik	1	3	5			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan IPLT	-	100%	1.742.925.500	100%	1.125.000.000	100%	1.125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	5	2.01		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten / kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan limbah domestik		100%	1.742.925.500	100%	1.125.000.000	100%	1.125.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1	3	5	2.01	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan		1 unit	1.415.100.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000		
			1	3	5	2.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		5 unit	327.825.500	5 unit	625.000.000	5 unit	625.000.000		
	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Persentase menurunnya kawasan rawan banjir/ genangan	1	3	6			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	Persentase berfungsinya saluran drainase kota untuk meningkatkan kawasan bebas banjir / genangan	82,66%	83,03%	20.623.990.200	83,59%	28.125.000.000	83,59%	28.125.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	6	02.01		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	82,66%	83,03%	20.623.990.200	83,59%	28.125.000.000	83,59%	28.125.000.000		
			1	3	6	02.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		2000 m	7.632.870.000	2000 m	12.025.000.000	2000 m	12.025.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1	3	6	02.01	0024	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		1 Sistem Drainase Perkotaan	9.783.020.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	12.025.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	12.025.000.000		
			1	3	6	02.01	0030	Penyusunan rencana, kebijakan, strategis dan teknis sistem drainase perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		12 dokumen	949.910.000	12 dokumen	975.000.000	12 dokumen	975.000.000		
			1	3	6	02.01	0031	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		1 Sistem Drainase Perkotaan	2.258.190.200	1 Sistem Drainase Perkotaan	3.100.000.000	1 Sistem Drainase Perkotaan	3.100.000.000		
		Persentase tersedianya tempat pembuangan sampah dikawasan perkotaan	01	03	07			**Program Pengembangan Permukiman**	Persentase tersedianya tempat pembuangan sampah dikawasan perkotaan		22%	231.300.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			01	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan sampah di wilayah kota		72%	231.300.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000		
			01	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun		1 Ton/Hari	231.300.000	1 Ton/Hari	2.000.000	1 Ton/Hari	2.000.000		
	Peningkatan kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	1	3	8			**Program Penataan Bangunan Gedung**	Persentase bangunan gedung yang terbangun	100%	100%	19.291.870.000	100%	36.050.000.000	100%	36.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	8	02.01		Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	Persentase bangunan/ gedung yang terbangun/ terehabilitasi		100%	19.291.870.000	100%	36.050.000.000	100%	36.050.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Fungsi Bangunan Gedung										
			1	3	8	02.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		8 Bangunan Gedung	500.000.000	8 Bangunan Gedung	525.000.000	8 Bangunan Gedung	525.000.000		
			1	3	8	02.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		2 dokumen	18.541.870.000	2 dokumen	35.250.000.000	2 dokumen	35.250.000.000		
			1	3	8	02.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),		10 dokumen	250.000.000	10 dokumen	275.000.000	10 dokumen	275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
	Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	Persentase penataan kawasan bangunan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan	1	3	9			**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	Persentase kawasan strategis / cagar budaya yang terbangun / terehab	100%	100%	1.829.302.000	100%	1.327.400.000	100%	1.327.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1	3	9	02.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah kabupaten/kota	Persentase bangunan/gedung yang terbangun/terehabilitasi		100%	1.829.302.000	100%	1.327.400.000	100%	1.327.400.000		
			1	3	9	02.01	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		1 kawasan	1.829.302.000	1 kawasan	1.327.400.000	1 kawasan	1.327.400.000		
	Peningkatan aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	1	3	10			**Program Penyelenggaraan Jalan**	Persentase kondisi jalan kota yang baik	95.70%	95.80%	37.372.671.600	95.90%	37.910.000.000	95.90%	37.910.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	10	02.01		Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab		95,80%	37.372.671.600	100%	37.910.000.000	100%	37.910.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			01	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun		5 dokumen	221.998.400	5 dokumen	325.000.000	5 dokumen	325.000.000		
			01	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti		2 jembatan	23.710.000	2 jembatan	3.000.000.000	2 jembatan	3.000.000.000		
			01	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun		1 km	2.216.740.000		2.000.000.000	0	2.000.000.000		
			01	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		8 km	23.288.630.000	8 km	18.025.000.000	8 km	18.025.000.000		
			01	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		1 km	929.010.000	1 km	1.525.000.000	1 km	1.525.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			0 1	0 3	1 0	2. 01	0 0 3 8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		25 jembatan	221.430.000	25 jembatan	275.000.000	25 jembatan	275.000.000		
			0 1	0 3	1 0	2. 01	0 0 4 1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur		1 km	4.175.930.000	1 km	6.025.000.000	1 km	6.025.000.000		
			0 1	0 3	1 0	2. 01	0 0 4 2	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala		2 jembatan	243.960.000	2 jembatan	275.000.000	2 jembatan	275.000.000		
			0 1	0 3	1 0	2. 01	0 0 4 3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		3 km	408.810.000	3 kecamatan	435.000.000	3 kecamatan	435.000.000		
			0 1	0 3	1 0	2. 01	0 0 4 6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		20 km	5.642.453.200	20 km	6.025.000.000	20 km	6.025.000.000		
	Peningkatan kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	1	3	1 1			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	Persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi		35%	1.175.698.300	40%	985.000.000	40%	985.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	1 1	02 .0 1		Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten		35%	262.795.000	40%	525.000.000	40%	525.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1	3	11	02.01	10	Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang difasilitasi sertifikasi		60 orang	262.795.000	60 orang	525.000.000	60 orang	525.000.000		
			1	3	11	02.02		Penyelenggaran sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Persentase tenaga jasa konstruksi yang kompeten		100%	103.926.500	100%	125.000.000	100%	125.000.000		
			1	3	11	02.02	13	Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		2 dokumen	103.926.500	2 dokumen	125.000.000	2 dokumen	125.000.000		
			1	3	11	02.04		Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha konstruksi yang diawasi		100%	808.976.800	100%	335.000.000	100%	335.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1	3	1 1	02 .0 2	4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		100 paket pekerjaan	808.976 .800	100 paket pekerjaan	335.000.000	100 paket pekerjaan	335.000 .000		
	Peningkatan ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai RTRW	1	3	1 2			**Program Penyelenggaran Penataan Ruang**	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	100%	100%	1.250.000.000	100%	1.325.000.000	100%	1.325.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun
			1	3	1 2	02 .0 1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW		100%	500.000 .000	100%	525.000.000	100%	525.000 .000		
			1	3	1 2	02 .0 1	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		1 dokumen	500.000 .000	1 dokumen	525.000.000	1 dokumen	525.000 .000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1 3 1 2 02 .0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW		100%	400.000 .000	100%	425.000.0 00	100%	425.000 .000		
			1 3 1 2 02 .0 3 3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		20 dokume n	400.000 .000	20 dokume n	425.000.0 00	20 dokume n	425.000 .000		
			1 3 1 2 02 .0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW		100%	350.000 .000	100%	375.000.0 00	100%	375.000 .000		
			1 3 1 2 02 .0 4 8	Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfatan ruang dan/atau pernyataaan mandiri pelaku UMK	Jumlah Dokumen Tekstual dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		300 dokume n	350.000 .000	300 dokume n	375.000.0 00	300 dokume n	375.000 .000		
		Nilai Evaluasi Implementa si SAKIP Perangkat Daerah	1 2 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85%	85 Skor	14.814. 889.953	85 Skor	18.400.00 0.000	85 Skor	18.400. 000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Madiun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Kabupaten/Kota										
			1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85%	85%	294.251.670	85%	175.000.000	85%	175.000.000		
			1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dokumen	140.868.950	8 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000		
			1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 laporan	153.382.720	12 laporan	75.000.000	12 laporan	75.000.000		
			1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen		100%	7.500.000.000	100%	7.750.000.000	100%	7.750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Administrasi Keuangan									
			1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		48 orang/bulan	7.500.000.000	48 orang/bulan	7.750.000.000	48 orang/bulan	7.750.000.000		
			1	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum		100%	467.087.000	100%	775.000.000	100%	775.000.000		
			1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	-	5 paket	300.000.000	5 paket	300.000.000		
			1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	467.087.000	12 laporan	475.000.000	12 laporan	475.000.000		
			1	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan		100%	496.721.848	100%	3.400.000.000	100%	3.400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
											Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Pemerintahan Daerah									
			1	2	1	02.06	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	-	2 unit	2.750.000.000	2 unit	2.750.000.000		
			1	2	2	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	496.721.848	2 unit	650.000.000	2 unit	650.000.000		
			1	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.200.316.799	100%	4.525.000.000	100%	4.525.000.000		
			1	2	2	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	4.200.316.799	12 laporan	4.525.000.000	12 laporan	4.525.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			1 2 1 02 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan		100%	1.856.512.636	100%	1.775.000.000	100%	1.775.000.000		
			1 2 1 02 .09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		54 unit	945.673.670	54 unit	825.000.000	54 unit	825.000.000		
			1 2 1 02 .09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 unit	678.650.000	5 unit	625.000.000	5 unit	625.000.000		
			1 2 1 02 .09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 unit	232.188.966	5 unit	325.000.000	5 unit	325.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun -1 (2025)		Tahun - 2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL							106.470.063.653		139.624.400.000		139.624.400.000			

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **THARIQ MEGAH, ST**

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd**

Jabatan : WALI KOTA MADIUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd	**THARIQ MEGAH, ST**
	NIP 197712102006041009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya aksesbilitas kota dalam kondisi mantab	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	95.80 %
2.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 %
3.	Meningkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %
4.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81.67 %
		Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	16.97 %
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	100 %
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100 %
5.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20 Indeks

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.326.374.003,01
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.004.500.000,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	689.721.000,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	993.471.390,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	23.926.027.000,05
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	27.754.586.500,00
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.868.550.700,00
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	39.839.288.486,00
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.222.678.550,00
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.511.538.169,33
	Jumlah	**Rp. 128.136.735.798,39**

Madiun, 01 Oktober 2025

WALI KOTA MADIUN

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

THARIQ MEGAH, ST
NIP 197712102006041009

Lampiran 4 Capaian Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya aksesibilitas kota dalam kondisi mantap	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95.80 %	96.05%	100.3%
2.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan tata ruang yang sesuai ketentuan	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	100 %	100 %	100 %
3.	Menigkatnya kualitas bangunan gedung Pemerintah	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	81.67 %	81.77%	100.2%
		Persentase kawasan rawan banjir/genangan	16.97 %	16.68%	101.7%
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum	100 %	100 %	100 %
		Persentase rumah tangga yang terlayani dalam uji coba pengelolaan lumpur tinja	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya kualitas layanan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.20 Indeks	4.38 Indeks	104%

Madiun, 14 Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Thariq Megah, S.T.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 197712102006041009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5 Penghargaan DPUPR Tahun 2025

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI	DOKUMENTASI
1	2	3	4
	Piagam Penghargaan Nomor : 050-401.204/616/2025 Dinas PUPR Atas Inovasi Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) Sebagai Terinovatif 4, Kategori I-Inovasi Perangkat Daerah, Anugerah Kompetisi Inovasi Kota Madiun (KIAT) Tahun 2025	DPUPR	

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI	DOKUMENTASI
2	Piagam Penghargaan Nomor : 060/2716/401.021/2025 Dinas PUPR Sebagai Terbaik IV Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat A dengan nilai 86,09	DPUPR	WALI KOTA MADIUN Piagam Penghargaan NOMOR: 060/2716/401.021/2025 Dengan bangga dipersembahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai TERBAIK IV Atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah predikat A dengan nilai 86,09 Madiun, 25 November 2025 Wali Kota Madiun Maidi